

WHATSAPP DAN PEMILIH PEMULA DI KOTA MEDAN: Partisipasi Politik Era Demokrasi Digital pada Pemilihan Gubernur Provinsi Sumatera Utara 2018

Erondd L. Damanik.

Prodi Pendidikan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan
eronddamanik@yahoo.com

Abstrak

Tulisan ini mendiskusikan partisipasi politik pemilih pemula pengguna WhatsApp di kota Medan pada pemilihan gubernur Provinsi Sumatera tahun 2018. Tujuan penelitian dimaksudkan untuk mengetahui pemahaman demokrasi dan tingkat partisipasi politik pemilih pemula yang menggunakan media sosial WhatsApp sebagai diskusi politik. Pemilih pemula didefinisikan sebagai anggota masyarakat yang memiliki hak pilih, berusia 17-21 tahun atau sudah/pernah menikah serta terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap. Guna mendekati permasalahan penelitian, kajian ini menggunakan teori *public sphere* dan *contagion*. *Public sphere* adalah ruang digital tempat diskusi kritis, rasional dan objektif yang ditularkan kepada orang lain. Masalah dalam kajian ini difokuskan pada bagaimanakah partisipasi politik pemilih pemula yang menggunakan WhatsApp di kota Medan pada pemilihan gubernur Sumatera Utara 2018?. Apakah media sosial WhatsApp dapat dianggap sebagai *public sphere* pada era digital?. Hasil penelitian menunjukkan partisipasi politik pemilih pemula pengguna WhatsApp mengalami peningkatan signifikan tetapi pemahaman demokrasi terkooptasi pada politik aliran. Demokrasi digital dikebiri politik aliran karena situasi sosial, lingkungan keluarga, kerabat dan teman sebaya, pengaruh mimbar dan simbol skriptual agama maupun paguyuban etnik. Kemudian, media sosial WhatsApp bukan *public sphere* melainkan '*mono sphere*' atau '*solo sphere*' yang diprivatisasi sebagai ruang diskusi terbatas sesama keluarga, kerabat, teman sebaya, teman satu agama maupun teman satu etnik.

Kata kunci: *Demokrasi digital, partisipasi politik, pemilih pemula, WhatsApp.*

Abstract

This article discusses the political participation of new voters of WhatsApp users in the city of Medan in the governor election of Sumatra Province in 2018. The purpose of the study was to find out about the understanding of democracy and the level of political participation of new voters who use WhatsApp social media as a political discussion. Beginner voters are defined as community members who have the right to vote, aged 17-21 years or have/have been married and registered as a Permanent Voter List. In order to approach the research problem, this study uses the theory of public sphere and contagion. *Public sphere* is a digital space where critical, rational and objective discussion is transmitted to others. The problem in this study focused on how political participation of new voters who use WhatsApp in city of Medan in North Sumatra gubernatorial election 2018?. Can WhatsApp social media be considered a public sphere in the digital age? The results of the study show that the political participation of new voters of WhatsApp users has increased significantly but the understanding of democracy is co-opted in the politics of identity. Digital democracy is castrated by politics of identity because of the social situation, family environment, relatives and peers, the influence of the pulpit and the religious scriptures and ethnic communities. Then, WhatsApp social media is not a public sphere but '*mono sphere*' or '*solo sphere*' which is privatized as a limited discussion room with family, relatives, peers, friends of religion and ethnic friends.

Keywords: *Digital democracy, political participation, new voter, WhatsApp.*

PENDAHULUAN

Sebesar 174.119 orang dari 9.052.529 Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Sumatera Utara tahun 2018 adalah pemilih pemula (KPU Sumatera Utara, 2018). Di kota Medan, pemilih pemula tahun 2018 terdaftar sebesar 74.835 orang dari 1.513.835 total DPT 2018 (KPU Medan, 2018). Walaupun jumlahnya kurang dari 20 persen dari total DPT, tetapi partisipasi politik pemilih pemula tidak bisa diabaikan begitu saja. Apabila pemilih pemula mendapatkan pengetahuan dan pemahaman politik yang cukup baik sesuai pilihan rasional misalnya, akan berdampak pada munculnya orientasi-orientasi politik yang sangat rasional. Asumsi demikian tentu saja berkontribusi bagi proses demokratisasi yakni dihasilkannya *'the best regime'* guna merumuskan kebijakan dan kepentingan publik.

Melihat proses demokratisasi pada era *political decentralization* sejak tahun 1998, maka realitas politik yang terlihat jelas paradoks dengan cita-cita 'kebaikan bersama' (*common good*) sebagaimana dijelaskan pada Ilmu Politik (Budiarjo, 2008; Surbakti, 2010; dan Marijan, 2011). Realitas politik dimaksud adalah menguatnya primordialisme (Geertz, 1967) ataupun politik aliran (Liddle, 1971) berupa sentimen-sentimen agama, etnik, kebangsaan, ataupun teritorial. Slogan-slogan seperti 'putra daerah' ataupun 'putra asli daerah', maupun 'satu etnik'; 'satu agama' ataupun 'satu kampung' menjadi *particular characteristic* politik lokal di Indonesia (Nordholt, Van Klinken dan Hooggenboom, 2007). Kenyataan lain adalah *butterfly effect* Pilkada DKI 2017 yang dianggap sebagai kulminasi politik Indonesia yang diserap pada Pilkada di sejumlah daerah di Indonesia (Hargen, 2018). Apabila realitas politik seperti ini tetap ditularkan kepada pemilih pemula, tentu saja melahirkan generasi-generasi politik yang terfragmentasi (*fragmented generation*). Pengetahuan dan pemahamannya sangat kerdil dan tandus.

Pemilih pemula adalah warga negara yang baru mentas di kehidupan politik. Mereka adalah anggota masyarakat yang berusia 17-21 tahun atau sudah/pernah menikah yang memiliki hak memilih pada pemilihan umum. Sebagai warga negara yang baru mentas di politik, pemilih pemula menurut belum memiliki jangkauan politik yang luas menentukan hak pilihnya. Keadaan ini menyebabkan pemilih pemula sangat rawan dipengaruhi logistik partai politik yang terjebak pada pragmatisme dan irasionalitas politik. Pemilih pemula adalah pribadi-pribadi yang unik, memiliki antusiasme politik yang relatif tinggi, lebih rasional, memimpikan perubahan serta kadar pragmatisme

yang relatif rendah. Namun menurut Litbang Kompas (2018), keputusan memilih bagi pemilih pemula masih sangat labil. Keadaan ini berimplikasi pada kecenderungan pemilih pemula sebagai *swing voters* atau bahkan *non voting behavior* sebagai dampak kurangnya kesadaran, pengalaman dan pemahaman politik.

Kondisi labil dan ketiadaan motivasi ideologis pemilih pemula berdampak pada keputusan politik yang *segmented*. Kenyataan keputusan politik seperti ini muncul karena pemilih pemula memiliki diskusi dan acuan politik hanya pada lingkungan terdekat seperti keluarga, kerabat, maupun teman sebaya. Seringkali, diskusi yang hadir pada lingkungan seperti ini mencerminkan dan terbatas pada diskusi yang menautkan politik pada ikatan primordialisme etnisitas seperti agama, etnik, kebangsaan ataupun teritorial. Selain itu, pengetahuan dan pemahaman politik melalui media televisi, media cetak maupun daring serta alat peraga politik seperti spanduk, brosur, poster dan lain-lain digiring ke ruang privat. Akibatnya, diskusi-diskusi politik menjadi terhambat (tidak leluasa) dan memunculkan penilaian politik berdasar ikatan-ikatan primordialisme, klientalistik maupun patronase. Karakteristik pemilih pemula menurut Suhartono (2009:6) memiliki nilai-nilai kultur yang cenderung santai, memimpikan kebebasan, pencarian kesenangan serta pengidentifikasian diri pada hal-hal informal. Karakteristik seperti ini ditambah kondisi psikologis yang labil, memudahkan pemilih pemula digiring pada pragmatisme (dan transaksionalisme) maupun sektarian politik.

Ironisnya, kemajuan *Web Technology 4.0* berupa internet dan media sosial di bajak (*hacked*) dan di giring ke ranah privat. Privatisasi media sosial seperti WhatsApp menutup diskusi politik yang berasal dari berbagai sudut pandang dalam menilai aktor dan aktifitas politik. WhatsApp menjadi media propaganda untuk menghakimi aktor politik yang berkontestasi pada pemilihan kepala daerah (Pilkada). Melalui WhatsApp, pesan personal disampaikan dari pribadi ke pribadi yang dianggap 'satu aliran politik' yang berasal dari patron politiknya. Setiap pribadi atau anggota kelompok WhatsApp saling mengomentari dan menularkan pandangan politiknya ke anggota lainnya pada kelompoknya.

Anggota diskusi di WhatsApp pemilih pemula sangat terbatas yang kecenderungannya berasal dari keluarga, kerabat, dan teman sebaya. Pada lingkup yang lebih luas, anggota WhatsApp cenderung berasal dari alumni sekolah, satu tempat kerja, satu kelas di perguruan tinggi ataupun satu profesi. Namun, seringkali WhatsApp menjadi sarana mengeliminasi anggota yang dianggap 'bukan satu aliran politik' atau

'bukan satu identitas' yang mengerucut pada perbedaan-perbedaan atribut primordial. Dampaknya ialah diskusi-diskusi di WhatsApp chat group terjadi secara linier yang mengarah pada satu aktor politik saja tanpa membuka ruang diskusi pada aktor politik lainnya.

Media sosial WhatsApp menjadi *social network* berintikan *chat group* maupun *broadcast* pada pemilih pemula tidak menghadirkan diskusi dari pemilih lintas atribut primordial, lintas profesi dan lintas strata sosial ekonomi. Karena itu, media sosial WhatsApp kurang mampu sebagai alat legitimasi struktur politik yang menghasilkan '*the best regime*'. Diskusi-diskusi yang dihasilkan pada WhatsApp menjadi alat penghakiman kepada aktor politik berupa ujaran kebencian, fitnah maupun penyebaran berita hoax. Difusi informasi dan berita pada WhatsApp cenderung berasal dari orang tua, kerabat maupun alumni yang dianggap satu aliran politik yang cenderung menggambarkan satu aktor politik saja. Diskusi-diskusi WhatsApp seperti ini cenderung menutup perspektif lain dalam menilai aktor dan aktifitas politik. Pada akhirnya, WhatsApp menjadi media penggiringan opini linier (satu arah) yang bersumber dari patron politik yang sarat dengan muatan politik aliran.

Menurut Lafarsfeld, Berelson & Gaudet (1948:15), perilaku memilih sangat dipengaruhi oleh identifikasi seseorang terhadap kelompok sosial dan norma-norma yang dianutnya. Dalam kajian ini, perilaku memilih dianalisis melalui tiga model menurut Kavanagh (1983) yakni: (1) sosiologis, (2) psikologi sosial, dan (3) pilihan rasional. Model sosiologis melihat perilaku dengan instrumen seperti status sosial ekonomi (pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan), agama, etnik dan tempat tinggal. Model psikologi sosial yaitu kekuatan psikologis dalam diri sendiri akibat proses sosialisasi politik menyangkut orientasi identifikasi partai, isu dan kandidat. Model pilihan rasional yakni preferensi berupa nilai atau pilihan 'laba rugi' bahkan reduksi resiko sekecil mungkin menjadi pertimbangan rasional (Karim, 1992; Ismawan dan Karim, 1993; Surbakti, 2010; Asfar, 2006; Roth, 2009; Pamungkas, 2010; Ritzer dan Goodman, 2007).

Pada kenyataannya, partisipasi politik pemilih pemula pengguna WhatsApp di kota Medan pada pemilihan gubernur Sumatera Utara tahun 2018 cenderung meningkat. Namun, partisipasi politiknya cenderung terkooptasi pada politik aliran sebagai dampak diskusi terbatas pada lingkungan keluarga, kerabat, teman sebaya dan patron politiknya. Diskusi politik pemilih pemula pengguna WhatsApp seperti ini menggeser *public sphere*

ke privatisasi yakni '*mono sphere*'. Realitas politik berupa keputusan politik lewat '*mono sphere*' ini ialah hadirnya pembelahan politik secara primordial dan religius. Dengan kata lain, WhatsApp pada pemilih pemula menjadi alat melegitimasi politik aliran (politik identitas) di kota Medan pada Pilkada Gubernur Sumatera Utara 2018. Karena itu, walaupun partisipasi politik pemilih pemula pengguna WhatsApp meningkat di kota Medan, tetapi media sosial itu bukan menjadi *public sphere* melainkan *mono sphere* karena bertentangan dengan defenisi umum seperti disebut Habermas.

Kajian ini memfokuskan diri pada partisipasi politik pemilih pemula pengguna WhatsApp di kota Medan pada pemilihan gubernur Sumatera Utara tahun 2018 yang difokuskan pada dua masalah yakni: bagaimanakah partisipasi politik pemilih pemula yang menggunakan WhatsApp di kota Medan pada pemilihan gubernur Sumatera Utara 2018?, dan apakah media sosial WhatsApp dapat dianggap sebagai *public sphere* pada era digital?. Guna mendekati kedua masalah ini, digunakan teori *public sphere* (Habermas, 1991) dan *Contagion* (Harrop & Miller, 1987). Teori *public sphere* memuat karakteristik utama yakni (a) *formation of public opinion*, (b) *all citizens have access*, (c) *conference in unrestricted fashion (freedom of assembly, freedom of association, freedom to expression and publication of opinions) about matters of general interest*, dan (d) *debate over the general rules governing relations*. Selanjutnya, teori *contagion* menyebut bahwa pilihan politik maupun partisipasi politik seseorang menular dari orang lain melalui kontak dan diskusi sosial, yaitu perilaku politik yang terbentuk karena 'dibicarakan bersama' dan menjadi 'pilihan bersama'.

Keputusan politik pemilih pemula dianalisis berdasarkan paradigma sosiologis, psikologi sosial dan pilihan rasional (Kavanagh,1983). Ketiganya menjadi dasar pembentuk perilaku memilih dan tindakan politik. Ketiganya menjadi penjelasan tentang sebab dan arah perilaku politik pemilih pemula yang menjadi fokus penelitian ini. Berdasar realitas politik pemilih pemula pengguna WhatsApp di kota Medan di atas serta didukung penjelasan teoritik maka menarik untuk mengamati kecenderungan perilaku politik pemilih pemula pada pemilihan gubernur Sumatra Utara tahun 2018. Karena itu, kontribusi kajian ini adalah menemukan partisipasi politik pemilih pemula pengguna WhatsApp pada era digital di kota Medan sekaligus penilaian terhadap WhatsApp sebagai '*public sphere*'.

METODE

Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yaitu penelitian yang memungkinkan eksplorasi terhadap entitas dan fenomena tunggal yang terikat waktu dan aktifitas (program, even, proses, kelembagaan dan kelompok sosial) dan mengumpulkan detail informasi yang digunakan untuk pengumpulan data selama periode jangka waktu tertentu (Creswell, 1994). Informan penelitian adalah pemilih pemula terutama pelajar dan mahasiswa berusia 17-21 tahun, memiliki WhatsApp serta terdaftar sebagai DPT di kota Medan. Informan ditetapkan secara random sampling sebanyak 50 orang. Sebanyak 25 orang berasal dari perguruan tinggi swasta dan negeri, sedangkan sisanya adalah pelajar kelas III SMA negeri dan swasta di kota Medan.

Alat pengumpul data penelitian adalah kuisisioner yang memuat 25 pertanyaan disertai 4 opsi jawaban. Pokok utama pertanyaan adalah menyangkut diskusi-diskusi WhatsApp, anggota grup WhatsApp, tema politik yang dibicarakan, keputusan politik, orientasi dan patron politik serta tindakan politik untuk menentukan pilihan pada pemilihan gubernur Sumatera Utara tahun 2018. Kuisisioner didistribusikan kepada 50 informan pada minggu pertama Agustus 2018. Disamping itu, dilakukan wawancara mendalam terhadap setiap informan. Wawancara mendalam dilakukan pasca data-data kuisisioner diproses melalui editing, koding dan pembersihan data. Setiap kategori informan (mahasiswa dan pelajar) ditetapkan masing-masing 3 informan untuk diwawancarai secara mendalam. Keenam informan ini adalah informan yang memiliki rata-rata jawaban tertinggi melalui kuisisioner. Wawancara mendalam terhadap 6 informan dilakukan pada minggu kedua Agustus 2018. Melalui kuisisioner dan wawancara, dilakukan analisis mendalam secara deskriptif maupun statistik sederhana guna menampilkan data dalam bentuk tabel atau grafik tanpa mengeneralisasi kesimpulan akhir. Penelitian difokuskan pada dua hal, (1) bagaimanakah partisipasi politik pemilih pemula yang menggunakan WhatsApp di kota Medan pada pemilihan gubernur Sumatera Utara 2018?, dan (2) apakah media sosial WhatsApp dapat dianggap sebagai *public sphere* pada era demokrasi digital dewasa ini?.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Partisipasi politik pengguna WhatsApp di kota Medan

Partisipasi politik (*political participation*) merupakan elemen penting bagi kehidupan demokrasi. Modernisasi politik yang cukup baik pada suatu negara dilihat dari tingkat

partisipasi politik warganegaranya. Semakin tinggi partisipasi politik warganegara dalam pemilu, maka negara tersebut bukan saja menunjuk tatanan demokratis, tetapi yang lebih penting ialah menunjuk pada legitimasi warga negara terhadap pemerintahnya. Sebaliknya, semakin rendah partisipasi politik warganegara pada pemilu, maka kenyataan ini menunjuk beberapa hal yaitu: i) pemahaman demokrasi warganegara yang sangat rendah, ii) delegitimasi pemerintahan, dan iii) sikap acuh tak acuh warganegara terhadap kondisi berbangsa dan bernegara.

Partisipasi politik menurut Huntington dan Nelson (1984) menunjuk pada aktifitas warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi untuk mempengaruhi perumusan keputusan pemerintah. Aktifitas politik dimaksud menurut Budiardjo (2008) adalah keterlibatan memilih pemimpin (presiden, gubernur, bupati atau walikota) yang secara langsung mempengaruhi kebijakan publik. Partisipasi politik adalah kesadaran dan kepercayaan warganegara terhadap legitimasi pemerintah. Partisipasi ini sangat dipengaruhi pengetahuan politik, status sosial dan ekonomi, afiliasi politik orangtua dan pengalaman organisasi. Faktor-faktor ini menjadi pendorong fluktuatifnya partisipasi politik. Karena itu, pengetahuan dan diskusi tentang politik yang baik bagi pemilih pemula akan menimbulkan partisipasi politik yang baik pula. Prakondisi demikian sangat penting guna menentukan dan melahirkan warganegara yang 'cerdas berpolitik'. Pada akhirnya, warganegara seperti ini berkontribusi positif terhadap munculnya *'the best regime'* untuk merumuskan keputusan politik sebagai 'kebaikan bersama' yang mengikat seluruh warganegara (Surbakti, 2010). Partisipasi politik yang sangat rasional merupakan cerminan perilaku politik warganegara untuk membentuk *good governance*.

Perilaku politik adalah tanggapan internal meliputi pikiran, persepsi, sikap dan keyakinan maupun tindakan tampak seperti pemungutan suara, gerak protes, lobi, kaukus maupun kampanye. Perilaku politik dipandang secara *contagion* (penularan) yaitu pilihan dan partisipasi politik yang menular kepada orang lain karena kontak sosial (Harrop dan Miller, 1987). Menurut pandangan ini, perilaku politik disebabkan oleh diskusi bersama dan akhirnya menjadi pilihan bersama. Secara substansial, perilaku politik pemilih pemula menurut Marijan (2011) menjadi salah satu indikator kualitas demokratisasi. Kualitas demokrasi dimaksud ialah hadirnya pemahaman demokrasi pemilih pemula yang tidak terkooptasi pada primordialisme, melainkan cenderung menunjuk pada demokrasi berdasar pilihan rasional. Namun, kondisi labil pemilih pemula membuat mereka terjebak pada pragmatisme ataupun politik aliran. Menyadari

kenyataan ini, KPU kota Medan menyelenggarakan program pendekatan kepada pemilih pemula yakni *goes to school* dan *goes to campus*. Di samping itu, di kantor KPU kota Medan terdapat 'Rumah Pintar Pemilu' yang secara khusus diabdikan kepada pemilih pemula agar cerdas memilih.

Sebagaimana disebut pada uraian di atas, terdapat 50 informan penelitian yakni pemilih pemula di kota Medan. Keseluruhan informan ini adalah pengguna WhatsApp yang membentuk *chat group* yakni grup alumni, grup kampus, grup keluarga, grup kerabat, grup teman sebaya, grup satu pengajian, grup satu kampung, dan grup satu klan. Kenyataan ini diperoleh dari contrengr kuisioner yang dibagikan kepada keseluruhan informan penelitian. Pemilih pemula menggunakan WhatsApp terutama untuk komunikasi dengan keluarga, teman sebaya dan teman sekolah. Keseluruhan informan mengakui menerima informasi dan berita melalui WhatsApp tentang kandidat gubernur Sumatera Utara tahun 2018. Menurut informan, berita dan informasi politik Pilgubsu diterima melalui WhatsApp sejak Mei 2018. Aktifitas pemilih pemula pengguna WhatsApp di Medan menyikapi berita dan informasi kandidat gubernur Pilgubsu 2018 dikelompokkan sebagai berikut:

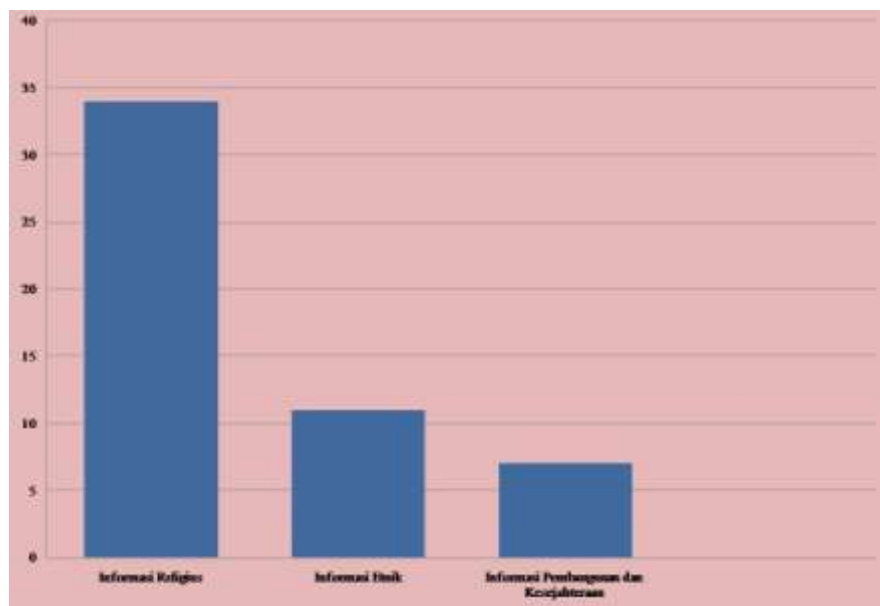
Tabel 1. Perlakuan pemilih pemula terhadap berita dan informasi WhatsApp

N	Aktifitas	Jumlah	Persentasi (%)
	Hanya membaca berita dan informasi	21	42
	Mengomentari berita dan informasi	6	12
50	Membagikan berita dan informasi	7	14
	Mengacuhkan berita dan informasi	16	32
	Jumlah	50	100

Sumber informasi dan berita politik tentang pemilihan gubernur Sumatera Utara tahun 2018 cenderung diterima dari orangtua, kerabat, teman sebaya maupun teman satu sekolah. Apabila berita dan informasi Pilgubsu diterima dari orangtua dan kerabat maupun patron lainnya, sebanyak 27 informan atau 54 persen mengaku tidak mau memperdebatkan informasi dan berita yang diterima. Selanjutnya, sebanyak 23 informan atau 46 persen mengakui bahwa diskusi pemilih pemula menjadi ramai apabila informasi dan berita masuk ke dalam WhatsApp berupa teman sebaya, teman alumni ataupun teman satu kelas di sekolah. Menurut 23 informan, diskusi WhatsApp dengan

teman sebaya, alumni ataupun teman satu kelas di sekolah jauh lebih leluasa (bebas) daripada beradu argumen dengan orangtua ataupun kerabat.

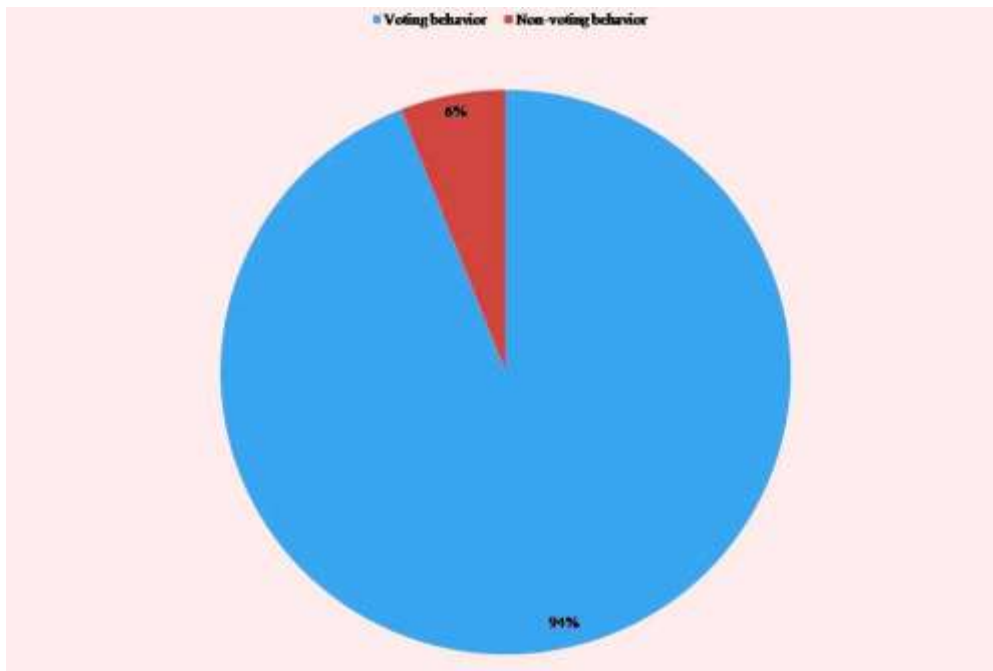
Informasi politik yang paling sering diterima pemilih pemula pada pemilihan gubernur Sumatera Utara tahun 2018 adalah berupa meme politik. Sebesar 24 informan atau 48 persen menyebut menerima kiriman berupa gambar dan nomor kandidat, 14 informan atau 28 persen menyebut menerima gambar, dan sisanya sebesar 12 informan atau 24 persen mengaku menerima kiriman gambar dan *quote* (kalimat singkat) kandidat. Dari pengakuan informan pemilih pemula ini dapat disimpulkan bahwa berita dan informasi yang mereka terima dari WhatsApp cenderung berupa ajakan atau seruan untuk memilih dan mencoblos kandidat gubernur. Apabila dilihat dari muatan atau kandungan informasi yang diterima pada WhatsApp mencerminkan kecenderungan pada ajakan pemilihan kandidat berdasar tema-tema religius yakni sebesar 32 orang atau 64 persen, 11 informan atau 22 persen mengakui menerima kiriman informasi kandidat berdasar agama, sedangkan 7 informan atau 14 persen mengakui menerima kiriman informasi berupa ekspektasi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan.



Gambar 1. Muatan dan kandungan informasi yang diterima pemilih pemula melalui WhatsApp di kota Medan pada pemilihan gubernur provinsi Sumatera Utara, 2018

Dari grafik di atas diketahui bahwa informasi-informasi yang diterima pemilih pemula melalui WhatsApp cenderung bertemakan agama, etnik dan pembangunan ekonomi serta kesejahteraan. Kenyataan ini mengindikasikan bahwa orientasi politik pemilih pemula cenderung menggambarkan kandidat religius, etnik dan pembangunan

ekonomi. Keadaan ini menjadi faktor pembentuk sikap dan orientasi politik yang lebih difokuskan pada kesesuaian agama antara pemilih dan kandidat. Tampaknya, pemilih pemula pengguna WhatsApp di Medan menghadapi pemilihan gubernur Sumatera Utara tidak bisa mengelak dari anjuran (himbauan) orangtua dalam menentukan pilihan kandidat gubernur.



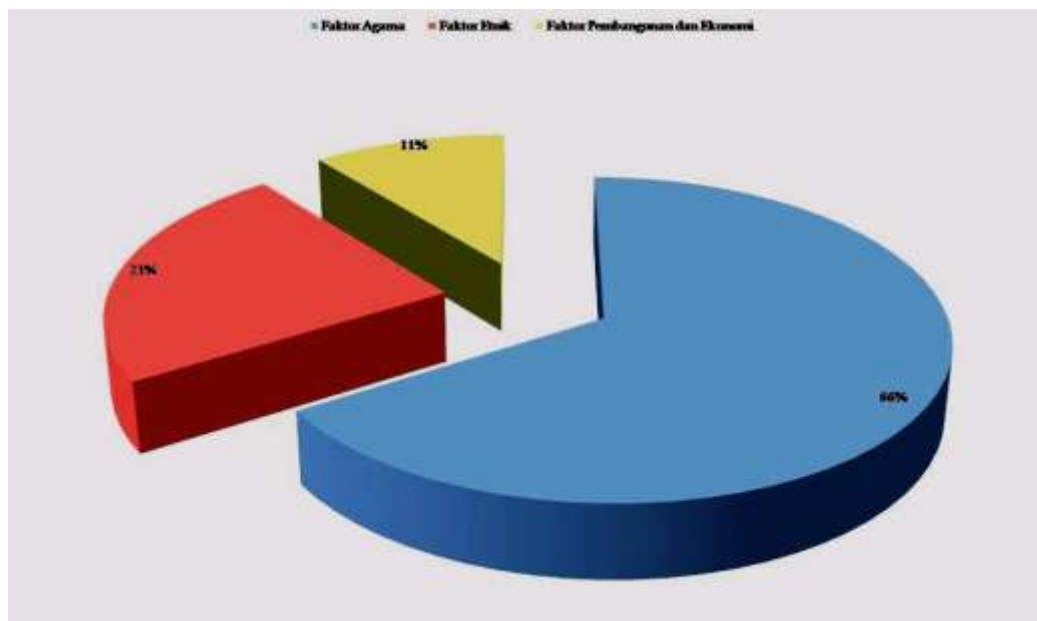
Gambar 2. Partisipasi politik pemilih pemula pengguna WhastApp di kota Medan pada pemilihan gubernur provinsi Sumatera Utara, 2018

Anjuran orangtua sekaligus menjadi faktor utama pemilih pemula menyampaikan hak politiknya pada tanggal 27 Juni 2018. Dari 50 informan, sebesar 47 orang atau 94 persen menyampaikan aspirasi politiknya sedangkan sisanya yakni 3 orang atau 6 persen lebih memilih *non voting behavior*. Kenyataan ini menyuguhkan informasi bahwa tingkat partisipasi politik pemilih pemula di Medan sangat tinggi. Antusiasme politik mereka disampaikan guna memilih gubernur, tetapi antusiasme itu dibajak orangtua mereka.

Namun, tidak seluruhnya himbauan orangtua menjadi acuan bagi pemilih pemula untuk menetapkan pilihan politik mereka pada Pilgubsu 2018. Dari 47 informan pemilih pemula yang menyampaikan aspirasi politiknya, terdapat sebesar 31 orang atau 65,9 persen mengikuti kemauan orangtua, dan sisanya yakni 16 informan atau 43 persen mengabaikan anjuran orangtua mereka. Kenyataan ini mengindikasikan bahwa

orangtua masih menjadi faktor utama partisipasi politik pemilih pemula di Medan. Selanjutnya, dari 47 informan yang menyampaikan aspirasi politiknya pada Pilgubsu 2018, sebesar 31 orang atau 65,9 persen memilih karena faktor agama, 11 informan atau 23,4 persen memilih karena faktor etnik dan sisanya yakni 5 orang atau 10,6 persen memilih karena ekspektasi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan.

Dari fakta ini dapat disimpulkan bahwa pemilih pemula menjatuhkan pilihan mereka pada pilgubsu 2018 karena anjuran memilih kandidat tertentu sesuai anjuran orangtua. Anjuran orangtua dimaksud lebih mendasarkan diri pada kesesuaian agama dan etnisitas kandidat dengan keluarga dari pemilih pemula. Situasi ini mengindikasikan bahwa faktor orangtua lebih dominan menjadi orientasi politik pemilih pemula di Medan. Mereka tidak bisa melepaskan diri dari anjuran orangtua sebab informasi yang diterima pemilih pemula cenderung satu arah (linier). Akibatnya, pemilih pemula tidak memiliki ruang untuk mendebatkan kandidat lainnya. Situasi politik Sumatera Utara kental dengan nuansa politik aliran, yakni partisipasi politik yang dibungkus dengan identitas terutama agama dan etnik.



Gambar 3. Perilaku memilih bagi pemilih pemula pengguna WhatsApp di kota Medan pada pemilihan gubernur Provinsi Sumatera Utara, 2018

Kenyataan sama juga ditegaskan Geertz (1984) bahwa etnisitas menjadi acuan partisipasi politik di Medan. Hal sama ditegaskan Perret (2010) bahwa Medan adalah tempat di mana pembelahan politik secara religius terjadi pertama kali di Indonesia.

Realitas semacam ini tampaknya tidak terbantahkan di Sumatera Utara yang merasuk hingga ke pemilih pemula. Tiga kali pemilihan gubernur di Sumatera Utara pada era desentralisasi politik yakni tahun 2008, 2013 dan 2018 tidak bisa dilepaskan dari politisasi agama sebagai kekuatan politik. Kesetiaan pemilih pemula pada anjuran orangtua menjadi dasar partisipasi politik pemilih pemula di Medan. Dengan kata lain, orangtua masih menjadi patron utama untuk menetapkan pilihan kandidat pada pemilihan gubernur Sumatera Utara.

Pemilih pemula di kota Medan menjadikan WhatsApp sebagai sarana diskusi politik mereka. Informasi dan berita seputar pemilihan gubernur Sumatera Utara tahun 2018 lebih banyak mereka peroleh dari WhatsApp. Namun, tidak berarti bahwa sumber-sumber informasi dan berita lainnya tertutup bagi mereka. Sumber-sumber informasi dan berita seputar pemilihan gubernur Sumatera Utara mereka dapatkan dari media cetak, media daring, media sosial seperti Facebook dan Twitter. Kebanyakan pemilih pemula memonitor Pilgubsu dari media sosial. Perhatian mereka dipusatkan pada meme politik, berita dan informasi yang banyak diunggah di media sosial seperti Facebook dan Twitter kemudian disebarkan melalui WhatsApp terutama bagi kelompok sebaya, teman satu alumni maupun teman satu kelas. Meme, berita dan informasi politik jarang sekali mereka sebar pada WhatsApp yang didalamnya terdapat orangtua dan kerabat karena sering sekali mendapat cekal dari patron mereka apalagi meme, berita dan informasi yang disebarkan berseberangan dengan orientasi politik keluarga mereka. Namun, ada juga pemilih pemula yang menyebarkan meme, informasi dan berita politik yang dianggap relevan dengan orientasi politik keluarga mereka, atau meme, berita dan informasi yang berintikan mendiskreditkan kandidat lain.

Kebanyakan pemilih pemula dalam penelitian ini lebih memilih media sosial daripada media cetak dan daring sebagai acuan politik mereka. Kenyataan ini disebabkan bahwa media sosial lebih menyuguhkan berita dan informasi singkat berupa *tagline* daripada media cetak dan daring yang memiliki kalimat panjang. *Tagline* politik yang di insert dengan gambar lebih mudah disebarkan dari WhatsApp dan didiskusikan bersama. Kenyataan ini berbeda dengan penyebaran berita dan informasi berisi kalimat panjang yang membutuhkan waktu relatif lama untuk membacanya. Selain itu, video singkat dapat disebarkan melalui WhatsApp sebagai pesan pribadi kepada seluruh chat group di WhatsApp. Kenyataan sebagaimana pengakuan informan penelitian ini menyuguhkan bahwa kemajuan *Web Teknologi 4.0* berkontribusi dalam penyebaran

berita dan informasi politik yang pada gilirannya meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula. Namun, informasi dan berita politik yang mereka pahami cenderung terfokus pada himbuan memilih saja tanpa adanya debat-debat visi misi, ekspektasi pembangunan dan kesejahteraan, rekam jejak ataupun harapan-harapan perubahan di masa datang.

Orientasi politik pemilih pemula di Medan lebih dimaknai sebagai upaya mobilisasi pribadi lintas pribadi melalui WhatsApp, di mana media ini menjadi sarana penyampai informasi secara *door-to-door* (dari pintu ke pintu). Informasi itu sarat dengan muatan politik identitas (politik aliran) yang tidak harus diperdebatkan (melainkan dikonsumsi saja). Atau pun, jika harus memperdebatkan kandidat, maka perdebatan itu lebih kepada penghakiman kandidat lainnya. Situasi seperti ini wujud karena anggota kelompok WhatsApp cenderung berasal dari 'kelompok sepaham' atau 'kelompok se-aliran' ataupun 'kelompok satu identitas' saja.

Perilaku politik pemilih pemula pengguna WhatsApp berdasarkan tiga model analisis menurut Kavanagh (1983) yakni: (i) sosiologis, (ii) psikologi sosial, dan (iii) pilihan rasional, dijelaskan sebagai berikut. *Pertama*, secara sosiologis bahwa pemilih pemula pengguna WhatsApp menjadikan orangtua sebagai patron politiknya. Kenyataan informasi dan berita yang disampaikan melalui WhatsApp jarang sekali diperdebatkan. Mereka cenderung memilih anjuran orangtua sebagai 'kebenaran politik' yang harus mereka ikuti. Orangtua menjadi preferensi politik pemilih pemula karena terkait erat dengan keluarga, predisposisi sosial ekonomi keluarga seperti agama, tempat tinggal, strata sosial ataupun karakteristik demografis kota Medan. Bagi pemilih pemula, orangtua menjadi preferensi politik utama karena kesetiaan pemilih pemula kepada patron politiknya disamping kesetiaan-kesetiaan kepada agama dan etnik. Informan Norman (19 tahun), seorang mahasiswa di perguruan tinggi swasta di Medan menyebut sebagai berikut:

Kelompok WhatsApp di Android-ku banyak sekali. Ada kurang lebih 17 kelompok seperti kelompok satu keluarga, kelompok famili (kerabat), kelompok satu alumni, kelompok satu kelas di kampus, kelompok Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) keagamaan, kelompok pengajian dan lain-lain. Pada WhatsApp keluarga dan kerabat, kami mendiskusikan kandidat nomor 1. Aku tidak banyak berdebat di grup kami. Orangtua sudah menganjurkan harus memilih kandidat 1. Ya....kupikirpun tak apalah. *Toch* cuma sebatas pilihan saja *kok* dan belum tentu menang. Namun, aku berharap kandidat itu menang sebagai gubernur karena sama-sama satu agama. Orangtuaku dan kerabat kami menganjurkan kami harus memilih kandidat 1. Aku dilarang tidak memilih (Golput) sebab dapat membuat kandidat itu (*nomor 1 maksudnya*) kalah. Akhirnya, akupun memilih kandidat ini pada pilkada kemarin.

Pilihan politik pemilih pemula lebih banyak ditentukan patron politiknya yakni orangtua. Hal ini terjadi karena ketidaktahuan tentang isu politik dari sumber lainnya. Pemilih pemula menganggap bahwa apa saja yang disampaikan orangtua adalah kebenaran politik yang sulit dibantah. Semenjak proses kandidasi hingga pencoblosan, orangtua sudah memiliki pandangan linier terhadap kandidat tertentu dan menutup rapat kandidat lain sebagai pilihan politiknya. Kondisi labil pemilih pemula dimanfaatkan orangtua untuk mencekoki orientasi pilihan politik berdasarkan pilihan orangtua mereka. Dengan demikian, pemilih pemula mendapatkan intimidasi, tekanan dan paksaan dari kelompoknya sendiri yakni orangtua yang orientasi politiknya sudah terkooptasi lebih dahulu. Realitas politik pemilih pemula di Medan seperti ini diketahui dari 47 informan yang menyampaikan aspirasi politiknya, ternyata sebesar 31 orang atau 65,9 persen mengikuti kemauan orangtua guna menetapkan pilihan politiknya. Sementara, hanya 16 informan atau 43 persen yang berani menolak anjuran orangtua guna menetapkan pilihan politiknya.

Kedua, secara psikologis sosial bahwa pemilih pemula di Medan menetapkan pilihan karena faktor orangtua. Sementara penilaian terhadap faktor identifikasi partai politik, orientasi kandidat dan orientasi isu kampanye kurang dilirik. Penilaian terhadap faktor partai politik berbasis agama sulit dilakukan karena menyebarnya partai-partai berhaluan nasionalis dan agama pada kandidat gubernur. Faktor dominan cenderung diletakkan pada faktor figur kandidat yakni memilih karena kesesuaian agama kandidat dengan agama keluarga. Jejak rekam kandidat cenderung tertutup oleh isu agama yang lebih kuat dibanding isu etnik serta pembangunan dan kesejahteraan. Agama menjadi kemasan politik yang menutup masa lalu figur, maupun orientasi terhadap masa depan pembangunan dan kesejahteraan.

Melalui pendekatan psikologi sosial ini, perilaku politik pemilih pemula lebih mencerminkan kesamaan agama daripada etnik ataupun pembangunan sosial. Kenyataan ini terjadi akibat penggunaan mimbar-mimbar agama yang *massif* ataupun penonjolan simbol-simbol skriptual agama melalui media sosial Facebook, Twitter maupun WhatsApp. Media sosial WhatsApp misalnya, dipergunakan untuk menyampaikan pesan berantai dari pribadi ke pribadi yang terus diproduksi dengan berbalut agama. Realitas sosial pemilih pemula pengguna WhatsApp di Medan menunjukkan bahwa 47 informan yang menyampaikan aspirasi politiknya, terdapat 31

orang atau 65,9 persen yang memilih karena kesesuaian agama kandidat dengan keluarga sedangkan sebesar 11 orang atau 23,4 persen memilih karena faktor etnik sedangkan 5 orang atau 10,6 persen memilih karena faktor ekspektasi pembangunan. Kenyataan ini memperlihatkan bahwa figur kandidat, kompetensi kandidat, isu atau tema kampanye politik lebih dikalahkan faktor penilaian terhadap agama kandidat.

Ketiga, yakni pilihan rasional (*rational choice*). sebanyak 50 informan penelitian, terdapat sebesar 47 orang yang menyampaikan aspirasi politik dan sisanya yakni 3 orang lebih memilih *non voting behavior*. Data-data penelitian menunjukkan bahwa, dari 47 informan yang menyampaikan aspirasi politik, terdapat sebesar 31 orang atau 65,9 persen yang mengikuti kemauan orangtua, dan 16 orang atau 43 persen yang menolak kemauan orangtua. Data ini menyuguhkan bahwa hanya 16 orang informan yang mampu melepaskan diri dari himbauan orangtua guna menentukan pilihan politiknya. Selanjutnya, dari 47 orang yang menyampaikan aspirasi politik itu, hanya 5 orang informan atau 10,6 persen yang menentukan pilihan bukan karena agama dan etnik melainkan pada ekspektasi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan. Data ini menyuguhkan bahwa dari 47 informan penelitian, hanya 5 orang saja yang menentukan pilihan berdasarkan pilihan rasional. Informan Meilyn (seorang mahasiswa di perguruan tinggi swasta dan pekerja paruh waktu) menyatakan sebagai berikut:

Saya menjatuhkan pilihan pada kandidat nomor (*eh rahasialah bang*), karena penilaian saya terhadap kandidat itu yang lebih baik. Pengalaman memimpin di daerah lain menjadi referensi saya menentukan pilihan bagi kandidat itu. Transparansi anggaran, kapabilitas manajerial ataupun tema nasionalisme yang dikampanyekan menurut saya jauh lebih penting bagi warga Sumatera Utara. Lihat saja dua gubernur sebelumnya. Saya *sih* berharap pada gubernur mendatang dapat membenahi provinsi ini lebih baik, infrastruktur lebih baik dan memadai, peluang dan kesempatan kerja yang luas, pungli ditiadakan, begal dan lain-lain. Satu hal lagi, kita harus nasionalis dan mementikan negara dan pembangunan ekonomi daripada sekedar agama dan suku. Saya kira, kandidat yang mengusung tagline mudah dan transparan jauh lebih baik bagi Sumatera Utara.

Dari limapuluh informan penelitian, hanya lima orang saja yang menentukan pilihan berdasar *rational choice*. Walaupun jumlahnya relatif kecil jika dibanding pemilih karena faktor agama dan etnik, tetapi eksistensi pemilih rasional pada masyarakat Sumatera Utara masih ditemukan walaupun pembelahan politik secara religius terasa semakin menguat. Masyarakat di kota Medan yang mencerminkan tatanan *plural and multi-culture society* ditandai oleh tingginya persaingan hidup. Kompetisi itu tidak saja dalam kehidupan sosial, ekonomi dan kultural tetapi juga merasuk jauh ke kehidupan

politik. Persaingan politik pada pemilihan gubernur Sumatera Utara menunjukkan irasionalitas pemilih pemula. Mereka dapat dipengaruhi, memiliki sikap ambivalen serta terpengaruh pragmatisme politik. Partisipasi politik yang muncul pada pemilih pemula di Medan cenderung terjadi karena anjuran orangtua. Pengaruh orangtua masih sangat dominan bagi pemilih pemula untuk memutuskan pilihan politik pada kandidat tertentu. Kenyataan ini menunjukkan bahwa partisipasi politik pemilih pemula di Medan cenderung tinggi sebagai dampak 'keharusan memilih' karena himbuan orangtua mereka. Pilihan politiknya juga sudah ditentukan orangtua yakni terhadap kandidat tertentu. Sikap dan pandangan seperti ini walaupun berkontribusi pada partisipasi politik, namun kesadaran dan pandangan politiknya masih tandus. Pemilih pemula tidak memiliki keleluasaan sendiri untuk menentukan tindakan politiknya. Kenyataan ini berarti bahwa pemilih pemula masih mengikat diri pada klientalistik politik, dimana orangtua sebagai patron utamanya.

Jadi, media sosial seperti WhatsApp berperan pada proses demokrasi yakni mobilisasi untuk meningkatkan partisipasi politik. Menurut Jebril, Stetka, dan Loveless (2013) media digital telah mengubah proses demokratisasi karena kecepatan dan skope transformasi lingkungan media digital. Kemungkinan ini disebabkan oleh revolusi demokrasi 'bukan televisi' yakni dampak politik televisi yang secara gradual digantikan oleh internet dan media sosial atau kemunculan teknologi komunikasi baru. Menurut kajian Kamwaria, et al (2015) disebut bahwa media sosial berperan mempromosikan etika dan pemerintahan yang baik (*good governance*). Media sosial relatif dapat diakses dan menjadi sarana publikasi dimana pemerintah dapat menggunakannya untuk mengikat publik pada isu dan kebijakan pemerintah. Namun demikian, media sosial adalah pedang bermata dua yang dapat membangun dan menghancurkan sekaligus. Menurut Schiffirin (2017), media teknologi tradisional dan baru pada media digital dewasa ini muncul bersamaan untuk pengembangan demokrasi, kemunculannya tidak saling menggantikan tetapi justru saling mengkombinasikan dan bersaing antara satu dengan lainnya.

Namun, seperti disebut Best dan Meng (2015) di Afrika di mana media sosial seperti Twitter menjadi alat demokrasi berupa kebijakan dan politik identitas di tiga negara yakni Nigeria, Ghana dan Kenya. Di Nigeria, Twitter menjadi sarana diskusi kesukuan, kewilayahan dan agama sebagai platform kebijakan. Di Ghana, Twitter menjadi sarana diskusi tentang isu kebijakan publik, sementara di Kenya, Twitter menjadi sarana

kicauan untuk memecahkan identitas kesukuan sebagai kampanye kebijakan. Pada pemilih pemula di Medan, WhatsApp dipergunakan untuk menguatkan politik identitas yakni agama dan etnik sebagai kerangka acuan politik. Melalui media sosial ini, penonjolan dilakukan terhadap kandidat yang seagama, sementara pendiskreditan bahkan fitnah dilakukan bagi kandidat lainnya.

Dari uraian ini, partisipasi politik pemilih pemula yang tinggi di kota Medan dapat wujud terutama karena pengaruh orangtua, teman sebaya maupun teman sekelas di kampus yang memiliki WhatsApp. Melalui media ini, keputusan politik pemilih pemula dibentuk dan mengarah pada kandidat tertentu. Pemilih pemula tidak memiliki kekuatan untuk menolak anjuran atau himbauan orangtua terhadap orientasi pilihan politiknya. Melalui WhatsApp, informasi dan berita pemilihan gubernur Sumatera Utara terus diproduksi berupa gambar kandidat, nomor kandidat, *tagline* ataupun *quote* kandidat. Melalui media sosial ini, kepada pemilih pemula terus menerus dihadirkan perhelatan politik Pilgubsu 2018. Dengan informasi dan berita Pilgubsu yang terus diproduksi, akhirnya membentuk 'semacam' keharusan memilih bagi pemilih pemula. Karena itu, pengetahuan dan pengalaman politik pemula sangat terlibat di kota Medan. Pada kasus seperti ini, peran orangtua menjadi sentral yang mengakibatkan adanya penularan (*contagion*) pemilihan gubernur Sumatera Utara. Pada taraf tertentu, penggunaan WhatsApp sebagai mekanisme penyampaian informasi dan berita pemilu sangat efektif karena setiap pesan (*message*) dapat disampaikan secara *door-to-door*, yakni group chat.

Menurut kajian Prokhorov (2012) media sosial terbukti menjadi seluler yang mudah diakses, media yang menyatukan dan tidak terkendali yang memungkinkan warganegara berbagi opini secara bebas serta memfasilitasi mobilisasi politik. Kenyataan pengguna WhatsApp bagi pemilih pemula di Medan memiliki kemiripan dengan pengguna facebook di Mesir tahun 2011 seperti disebut Prokhorov. WhatsApp membantu aktifitas koordinasi dan monitoring pada Pilkada Sumatra Utara di Kota Medan. Kenyataan serupa terjadi di pada pemilihan presiden di Ghana tahun 2016 (Moreno, Garrison dan Bhat, 2017). WhatsApp menjadi mobilisasi partisipasi politik pemilih pemula di Medan pada Pilgubsu 2018. Kenyataan serupa terjadi di Brazil sebagaimana dijelaskan (Moura dan Michelsen, 2017).

WhatsApp pada era digital (*digital age*) dipergunakan sebagai metode luar biasa untuk menyampaikan pesan pribadi (*personal messaging*) dari pemilih pemula ke pemilih pemula yang lain. Intensitas pemberitaan Pilgubsu di WhatsApp pada gilirannya

membentuk sikap dan orientasi politik pemilih pemula. Media ini menjadi sarana pengiriman berita dan informasi secara *door-to-door mobilization*. Karena itu, demokrasi yang terbentuk bagi pemilih pemula di Medan adalah bahagian dari demokrasi digital (*digital democracy*). Teknologi digital dipergunakan untuk memonitor Pilgubsu, membentuk orientasi politik, meneguhkan pilihan politik serta berpartisipasi pada Pilgubsu. Keterlibatan pemilih pemula pada Pilgubsu 2018 cenderung berorientasi pada himbauan orangtua sebagai patron politiknya. Mereka adalah generasi milenial masih labil dan baru *mentas* di panggung politik pada Pilgubsu 2018. WhatsApp menjadi media menularkan Pilgubsu yang efektif bagi pemilih pemula. WhatsApp menjadi mekanisme penularan efektif informasi dan berita Pilgubsu 2018. Namun, pemahaman demokrasi yang tumbuh pada pemilih pemula masih menggambarkan politik aliran (politik identitas) karena mereka tidak memiliki keleluasaan dalam memutuskan pilihan politiknya.

2. *WhatsApp pada demokrasi digital di kota Medan*

Tujuan kedua yang menjadi sasaran kajian ini adalah menyoal peran dan kedudukan WhatsApp sebagai *public sphere*. Keseluruhan pemilih pemula di Medan dalam kajian ini adalah pengguna WhatsApp. Tidak hanya WhatsApp, tetapi mereka juga memiliki media sosial lainnya seperti Facebook dan Twitter. Namun, pemilih pemula di Medan lebih memilih WhatsApp sebagai *social network* ataupun media diskusi dan bertukar informasi. Pilihan ini disebabkan karena WhatsApp dapat dibentuk menjadi *social network* yang lebih tertutup, penggunaan yang sederhana serta biaya yang relatif murah. Selain itu, WhatsApp mampu dan efektif mengirimkan berbagai jenis file seperti gambar, video, *attachment word* atau *pdf* ataupun meneruskan *link* berita dan informasi. Berbeda dengan Twitter atau Facebook.

Walaupun kedua media ini dapat menyampaikan berbagai pesan dan file, tetapi karena sifatnya lebih terbuka dan dapat dibaca setiap teman secara berjejaring, maka kedua media ini jarang digunakan untuk bertukar informasi dan berita. Keadaan ini menimbulkan kekhawatiran bagi pemilih pemula untuk memposting berita ataupun informasi yang belum diketahui kebenarannya. Fenomena ditangkapnya individu-individu yang mencerminkan kejahatan media sosial, membuat efek ketakutan bagi pemilih pemula untuk menyebarkan berita dan informasi yang dianggap kurang valid. Setiap pemilih pemula dalam kajian ini memiliki android ataupun smartphone dari

berbagai tipe dan merk. Paket-paket internet dibeli untuk dapat menjalin komunikasi murah dengan sesama, mengakses *youtube*, *game online*, akses berita, ataupun sekedar swafoto.

WhatsApp menjadi pilihan media yang relatif aman sebagai media komunikasi dan diskusi politik Pilgubsu 2018. Melalui WhatsApp, hajatan politik Pilgubsu lebih ramai dan hangat dibicarakan. Hal ini terjadi karena anggota WhatsApp terdiri dari pribadi-pribadi yang memiliki peran yang sama seperti teman sebaya, teman satu kelas di perguruan tinggi, teman satu unit kegiatan mahasiswa dan atau bahkan teman satu komunitas. Apabila anggota WhatsApp terdiri dari level yang sama, maka diskusi politik dan demokrasi lebih menarik dan menohok ke substansinya. Namun, apabila dalam WhatsApp terdapat perbedaan kelas ekonomi, pekerjaan, strata sosial ataupun agama diantara sesama anggota, maka diskusi tidak berjalan dengan menarik. Biasanya, pemilih pemula atau anggota WhatsApp dari strata ekonomi, sosial dan pekerjaan yang lebih rendah, lebih memilih diam dan tidak banyak berkomentar. demikian pula apabila kelompok WhatsApp terdiri dari lintas agama, maka berita dan informasi agama, jarang mendapat pembahasan serius. Walaupun sebagian diantara kelompok WhatsApp memosting berita dan informasi agama, maka biasanya respon atau komentar tidak terjadi dengan alot. Sebagian besar hanya membaca saja tanpa memberikan komentar apapun.

Pemilih pemula pengguna WhatsApp yang anggotanya terdiri dari orangtua dan kerabat, maka sikap pemilih pemula cenderung terkekang. Mereka hampir tidak bisa berkomentar ataupun menganggapi berita yang dikirimkan orangtua atau kerabat mereka. Sikap diam dipilih karena takut dianggap tidak sejalan dengan orangtua atau kerabat mereka. Kenyataan ini berimplikasi bahwa sebenarnya diskusi-diskusi di WhatsApp tidak bebas, leluasa dan cenderung terjadi satu arah, yakni dari patron ke klien. Kenyataan seperti ini bukan hanya terjadi pada pemilih pemula di WhatsApp keluarga, tetapi juga pada kelompok-kelompok profesi dimana terdapat *top leader* di dalamnya.

Pada kontestasi politik seperti Pilgubsu 2018, maka diskusi-diskusi politik sangat diharapkan terjadi pada pemilik hak suara. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan pengetahuan dan pemahaman politik yang luas dan substansial. Melalui diskusi-diskusi demokrasi, diharapkan kebaruaran dan pembaharuan demokrasi. Namun yang terjadi dewasa ini adalah menggeser diskusi demokrasi ke sektor privat melalui kemajuan

teknologi digital. Diskusi-diskusi digital ini justru membungkam pemahaman demokrasi menjadi sektoral, partisan ataupun berdasarkan aliran tertentu. Anggota-anggota WhatsApp memperlihatkan 'keluar masuk' anggota karena perbedaan pendapat sesama anggota. Kenyataan ini tidak menempatkan WhatsApp sebagai ruang publik sebagaimana ditegaskan Habermas.

Diskusi-diskusi demokrasi membuat opini publik mengetahui tujuan demokrasi sehingga demokrasi dapat tumbuh lebih baik. Apabila mengikuti kajian Habermas (1991), diketahui bahwa *coffee houses, intellectual and literary salons*, dan *print media* menjadi tempat-tempat di perkotaan yang sangat baik memperbincakan politik di Eropa abad-18. Tempat-tempat ini disebut sebagai *public sphere* atau ruang publik. Ruang publik merupakan arena debat rasional bagi politik terutama untuk membantu penguatan demokrasi dan mempromosikan *enlightened ideals of equality, human rights and justice* (Habermas, 1991:69). Ruang publik menjadi wadah pembimbingan komunikasi yang sesuai dengan norma berupa argumen rasional dan kritis untuk menguatkan pernyataan yang lebih penting daripada membicarakan identitas pembicaranya. Melalui ruang publik diperoleh kesepakatan tertinggi untuk perubahan yang ditekankan pada peluang masyarakat mengeluarkan opini. Opini publik menjadi dasar terbentuknya *common sense* (pendapat bersama). Ditularkan kepada setiap masyarakat untuk membentuk *prejudices* (prasangka) tetapi mencerminkan kebutuhan mendesak dan cenderung memiliki kebenaran bersama. Kondisi seperti ini terbentuk pada diskusi publik dimana setiap publik berprasangka melalui pendidikan dan informasi.

Ruang publik adalah konsep kritis karena dua hal: *pertama* untuk membantu analisis masyarakat modern yang hidup sesuai ekspektasi mereka sendiri. Asumsi ini memungkinkan menguji kebebasan berpendapat dan implikasi opini publik atau kebebasannya dibatasi oleh pendidikan ataupun material mereka. Selain itu, konsep ruang publik memungkinkan pengujian terhadap nilai-nilai kebebasan berserikat dan berkumpul dengan menganalisis visibilitas dan pengaruh aktor kuat yang mendominasi, *kedua* konsep ruang publik ditekankan pada: (a) *a space of political communication*, dan (b) *access to resources that allow citizens to participate in the public sphere is crucial*. Situasi dewasa ini telah berubah. Mendiskusikan dan perbincangan politik bukan saja melalui sarana tradisional tetapi telah bergeser ke teknologi digital. Demokrasi tradisional bergeser ke demokrasi digital, dimana teknologi digital menjadi alat membicarakan demokrasi.

Kemajuan *Web Technology 4.0* dewasa ini berdampak pada penggunaan internet sebagai *social network*. Demokrasi tradisional sedang beralih ke demokrasi digital dimana internet sebagai alat komunikasi demokrasi. Pada aspek politik, kemajuan teknologi ini menjadi format baru yang sangat efektif sebagai komunikasi politik di era digital (Lassen & Brown, 2011; Burgess & Bruns, 2012; Larsson & Moe, 2012; Small, 2012; Vergeer, Hermans & Sams, 2012; Graham, Jackson & Broersma, 2014 dan Adi, Erickson & Lilleker, 2014). Teknologi digital ini dapat mempengaruhi pandangan dan penilaian warga negara pada setiap aktifitas politik. Bahkan setiap warga negara yang terikat perbedaan sosiokultural sekalipun, potensial dipengaruhi oleh teknologi internet.

Internet menciptakan intimasi dan percakapan rasional antara aktor politik dengan masyarakat (Coleman & Blumler, 2009). Teknologi internet berupa media sosial berperan sebagai (i) alat propaganda, (ii) platform penghubung situasi dengan individu, dan (iii) sosialisasi kebijakan kepada audiens. Media sosial menciptakan '*connected representation*' yang memungkinkan mengakarnya hubungan masyarakat dengan aktor politik karena *sense of proximity, visibility and continuity* (Graham, Broersma & Hazelhoff, 2013). Media sosial seperti Twitter adalah '*microblogging*' guna melayani konstituen dan manajemen impresi (Jackson & Lilleker, 2012) yang memuat difusi berita dan informasi (Davis, 2010) dan menjadi media sosial pertama yang dipergunakan sebagai alat kampanye dan mobilisasi (Kennedy, 2008). Pada awal kemunculannya, media ini berperan sebagai alat potensial untuk mengeksplor perilaku politik (Ovadia, 2009) ataupun visualisasi politik (Neuhaus & Webmoor, 2012). Media sosial ini menjadi *telepresence* sekaligus penyampai pesan online (Hutchins, 2011). Sejak kemunculannya hingga hari ini, Twitter menjadi saluran komunikasi politik yang efektif dan efisien untuk menyapa audiens.

Media sosial pada era digital dewasa ini menjadi alat bertukar informasi dan berita seputar isu-isu kepentingan publik. Kemunculannya pada dunia politik tidak dapat dihindari, bahkan menjadi diseminasi instan setiap data yang berasal dari sumber resmi maupun tidak resmi. Pada prinsipnya, kontribusi teknologi internet memacu diskusi, seleksi, dan filtering setiap aktifitas politik. Walaupun media sosial dapat dikatakan sebagai sarana demokratisasi, tetapi kenyataan berbeda muncul dari kajian von Orgies-Rutenberg (2016). Penulis ini menyebut bahwa komunikasi digital menunjukkan keterbatasan cara kerja sebagai alat demokrasi. Keterbatasan media pada era demokrasi digital disebabkan privatisasi ruang publik, lingkungan problematik dan wacana

minoritas, serta fragmentasi pandangan tentang penggunaan dan tujuan penggunaan. Hasil penelitian Irina Lazăr (2015) pada pemilihan Presiden Romania tahun 2014 menyebut bahwa teknologi internet tidak mentransformasikan proses pembuatan aturan pada level lokal, nasional atau Eropa, namun lebih mendekati pada penciptaan hubungan kelembagaan antara warganegara dengan institusi untuk memobilisasi sumberdaya pada budaya sipil dan stabilitas kelembagaan.

Bila dihubungkan dengan *public sphere* seperti dinyatakan Habermas, maka media sosial seperti Twitter, Facebook dan WhatsApp bukanlah *public sphere*. Menurut Fuchs (2013), media sosial bukanlah ruang publik karena tidak menyuguhkan keseimbangan masyarakat yang menjadi anggotanya. Media sosial bertentangan dengan perspektif Habermas tentang ruang publik yang seharusnya menjadi sarana kritik terhadap struktur demi kebaikan bersama. Media sosial adalah '*solo sphere*' yakni mode partisipasi politik alternatif yang memiliki konsekuensi melemahkan, merendahkan dan mendelegitimasi. Jadi, media massa dan pertumbuhan demokrasi menyisakan pertanyaan sebagaimana disebut McConnell dan Becker (2002): apakah media memproduksi demokrasi? atau demokrasi memproduksi media?, atau media membutuhkan kebebasan tinggi menyuarakan demokrasi? atau tidak ada sama sekali hubungan media dengan demokrasi?. Habermas telah mencatat bahwa *public sphere* tidak semata-mata tentang media, tetapi tentang penciptaan konsep yang memungkinkan adanya kritik terhadap struktur yang tidak memiliki '*common good*' atau membatasi kebaikan bagi masyarakat. Media sosial bukanlah penyebab protes. Media sosial menyatu dalam kontradiksi dan struktur kekuasaan masyarakat modern. Hal ini berarti bahwa masyarakat dimana media sosial berkembang tidak sepenuhnya menyebabkan terjadinya situasi gempar.

Media sosial seperti internet dan media lainnya adalah kontradiksi sebab kehidupan masyarakat juga sangat kontradiktif. Konsekuensinya sangat kontradiktif yakni masyarakat harus merendam atau mencegah protes, memperkuat atau memajukan protes, atau tidak berpengaruh samasekali. Media lainnya seperti media komersial berdiri pada relasi kontradiktif dengan perebutan kekuasaan dan lainnya. Media bukanlah satu-satunya faktor pengaruh terhadap protes sebab berdiri pada hubungan kontradiktif dengan politik dan ideologi yang juga berpengaruh pada protes. Muncul atau tidak munculnya protes dibentuk faktor kompleks yang tidak dapat diperkirakan sebagai akibat dari krisis tertentu. Pada saat protes muncul maka media, politik dan budaya memiliki pengaruh kontradiktif permanen yang tidak dapat diproyeksi apakah faktornya

bersifat netral, memperkuat atau merendam protes. Dalam kehidupan bernegara dimana terdapat kelompok antagonis, protes sering diperhadapkan pada tindakan polisi. Negara bereaksi terhadap gerakan sosial dan bentuk kekerasan terorganisasi yaitu serangan delegitimasi yang dilakukan media, politisi dan lainnya dapat memperkuat atau merendam protes.

Melalui kajian ini diperoleh informasi menyakinkan bahwa WhatsApp berkontribusi dalam menyebarkan informasi dan berita Pilgubsu 2018. Melalui WhatsApp, partisipasi pemilih pemula dapat diarahkan untuk memilih kandidat tertentu. Melalui mekanisme ini, partisipasi pemilih pemula pada Pilgubsu 2018 tergolong sangat tinggi. Dalam hal ini, WhatsApp menjadi mobilisasi *door-to-door* melalui pesan pribadi. Namun, perbincangan ataupun diskusi pemilih pemula di WhatsApp tidak menyuguhkan kesetaraan diskusi karena patron cenderung memaksakan kehendak politiknya. Kenyataan seperti ini terjadi pada WhatsApp yang terdiri dari orangtua, kerabat, kelompok keagamaan, paguyuban etnik dan lain-lain. Kenyataan seperti ini menjadi legitimasi terhadap politik aliran atau politik identitas bagi pemilih pemula di kota Medan. Situasinya berbeda apabila para anggota WhatsApp terdiri dari teman sebaya, teman sepermainan dan lain-lain yang menunjuk pada kesederajatan anggota di dalamnya. Namun, keadaan labil dan baru *mentas* bagi pemilih pemula justru menghadirkan pemahaman politik yang tandus. Mereka menunjukkan antusiasme politik, tetapi arah politik mereka tidak berkembang dengan baik.

Berangkat dari uraian ini, WhatsApp bukanlah *public sphere*. WhatsApp bukanlah media yang tepat menumbuhkan pembaharuan demokrasi. WhatsApp tidak berperan samasekali menumbuhkan pemahaman politik yang lebih demokratis. Kenyataan ini terjadi karena: (i) pembajakan wacana oleh patron, (ii) ketidaksetaraan anggota dalam kelompok WhatsApp, dan (iii) anggota WhatsApp yang cenderung homogen. Tiga kenyataan ini bertentangan dengan karakteristik *public sphere* sebagaimana ditegaskan Habermas: (a) *formation of public opinion*, (b) *all citizens have access*, (c) *conference in unrestricted fashion (freedom of assembly, freedom of association, freedom to expression and publication of opinions) about matters of general interest*, dan (d) *debate over the general rules governing relations*. Pada akhirnya, WhatsApp adalah alat demokrasi yang membajak atau menaruh perbincangan demokrasi publik ke sektor privat. Privatisasi demokrasi itu berimplikasi pada politik aliran (politik identitas) sebagaimana ditunjukkan pemilih pemula di kota Medan pada Pilgubsu 2018. Karena itu, pada era demokrasi digital bagi

pemilih pemula di Medan, WhatsApp bukanlah *public sphere* melainkan '*solo sphere*' atau '*mono sphere*' yaitu mode partisipasi alternatif politik yang bersifat melemahkan, merendahkan, mengintimidasi ataupun mendelegitimasi.

KESIMPULAN

Kajian tentang WhatsApp dan Pemilih Pemula di kota Medan: Partisipasi politik era demokrasi digital pada pemilihan gubernur provinsi Sumatera Utara, 2018 menyimpulkan dan merekomendasikan beberapa poin penting di bawah ini, yaitu: *pertama*, partisipasi politik pemilih pemula pengguna WhatsApp di kota Medan pada Pilgubsu 2018 sangat tinggi yakni 47 informan menyampaikan hak suara dan hanya 3 orang memilih *non voting behavior*. Media sosial WhatsApp dipergunakan sebagai metode tersebut menyampaikan pesan pribadi antara kandidat, orangtua, teman sebaya, teman sekelas ataupun teman sepermainan. Intensitas pemberitaan di WhatsApp membentuk sikap dan orientasi politik pemilih pemula. Teknologi digital dipergunakan untuk memonitor Pilgubsu, membentuk orientasi politik, meneguhkan pilihan politik serta berpartisipasi pada Pilgubsu. WhatsApp menjadi mekanisme penularan efektif informasi dan berita Pilgubsu 2018 yang dilakukan secara *door-to-door mechanism* melalui *personal message*. Kenyataan ini berdampak pada tingginya partisipasi politik pemilih pemula di kota Medan sebagai dampak penularan (*contagion*) pesan ke setiap anggota yang terjadi secara intensif.

Kedua, media sosial WhatsApp bukan *public sphere* melainkan '*solo sphere*' atau '*mono sphere*' yang diprivatisasi sebagai ruang diskusi terbatas sesama keluarga, kerabat, teman sebaya, teman satu agama maupun teman satu etnik. Walaupun WhatsApp berfungsi sebagai mobilisasi pemilih pada *democracy digital*, tetapi WhatsApp bukanlah media yang tepat menumbuhkan pembaharuan demokrasi. WhatsApp tidak berperan samasekali menumbuhkan pemahaman politik yang lebih demokratis. Kenyataan ini terjadi karena: (i) pembajakan wacana oleh patron, (ii) ketidaksetaraan anggota dalam kelompok WhatsApp, dan (iii) anggota WhatsApp yang cenderung homogen. *Ketiga*, guna mendapatkan hasil kajian yang lebih luas, maka diperlukan penelitian-penelitian yang lebih komprehensif yang melibatkan jumlah pemilih pemula yang lebih besar serta melibatkan media sosial lainnya.

REFERENSI

- Adi, A., Erickson, K. & Lilleker, D. (2014). "Elite Tweets: Analyzing the Twitter Communication Patterns of Labour Party Peers in the House of Lord", *Policy & Internet* 6(1), 127.
- Asfar, M. (2006). *Pemilu & Perilaku Memilih 1955-2004*. Surabaya: Pustaka Eureka.
- Best, Michael L. and Meng, Amanda. (2017). Twitter Democracy: Policy versus identity politics in three emerging African democracies. *ICTD* 15.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Burgess, J. & Bruns. A. (2012). "(Not) The Twitter election: The dynamics of the #ausvotes conversation in relation to the Australian media ecology", *Journalism Studies* 6, 384-402.
- Coleman, S. & Blumler, J., G. (2009). *The Internet and Democratic Citizenship: Theory, Practice and Policy*. Cambridge. UK: Cambridge University Press.
- Creswell, J., W. (1994). *Research Design: Quantitative and Qualitative Approach*. 1994. London: Sage.
- Davis, A. *Political Communication and Social Theory*. 2010. London, UK: Taylor & Francis, 2010.
- Fuchs, Christian. (2013). Twitter and Democracy: A New Public Sphere?. In *Social Media: a critical Introduction*. Washington: Sage Publication
- Geertz, C. (1967). "the Integrative Revolution: Primordial Sentiments and Civil Politics in New States", in Clifford Geertz (ed.), *Old Societies and New States*, 3rd Edition. New York: The Free Press.
- Graham, T. Jackson, D. & Broersma, M. (2014). "New platform, old habits? Candidates' use of Twitter during the 2010 British and Dutch general election campaigns" *New Media and Society*, 1-19,
- Graham, T., Broersma, M. & Hazelhoff, K (2013). "Closing the Gap? Twitter as an instrument for connected representation". In Scullion, R. Gerodimos, Jackson, D. and Lilleker, D. (Eds.), *The Media, Political Participation and Empowerment*. London: Routledge.
- Habermas, J. (1991). *The structural transformation of the Public Sphere*. 1991. MIT Press
- Harrop, M. and Miller, W. (1987). *Election and Voters: A Comparative Introduction*. 1987. London: The Macmillan Press.
- Hargen, Boni. (2018). Membajak Begundal Demokrasi. *Kompas*, 11 Juli.

- Huntington, Samuel P. dan Nelson, Joan M. (1984). *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. 1984. Jakarta: Sangkala Pulsar.
- Hutchins, B. (2011). "The acceleration of media sports culture: Twitter, telepresence and online messaging", *Information, Communication & Society*, 14(2), 237-257.
- Imawan, R. dan Karim, Afan Gaffar. (1993). *Analisis Pemilihan Umum 1992 di Indonesia*. Laporan Penelitian Fakultas ISIPOL Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Jackson, N. & Lilleker, D. (2011). "Microblogging, constituency service and impression management: UK MPs and the use of Twitter" *The Journal of Legislative Studies* 17, 86-105.
- Jebriil, N., Stetka, V. and Matthew, Loveless, M. (2013). *Media and Democratisation: What is Known about the Role of Mass Media in Transitions to Democracy*. 2013. Report Reuters Institute for the Study of Journalism, University of Oxford.
- Karim, Afan Gaffar. (2006). *Javanese Voters: A Case Study of Election under A Hegemonis Party System*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Kamwaria, Alex N, Kamau, John Macharia, Githaiga, Anne Juliet, Guantai, Peter Mutuma, Mugwe, Rukahu, Makin, Kasoo Richard and Dida, Golo Boru. (2015). Socialising Government: Evaluating the Role of Social Media in Governance and Ethics in Kenya. *International Journal of Humanities and Social Science* 5 (1) 117-122.
- Kavanagh, D. (1983). *Political Science and Political Behaviour*. London: Allen and Unwin.
- Kennedy, J. (2008). "Twitter and Digg to introduce social media to U.S. election coverage" Retrieved from <http://www.siliconrepublic.com/news/article/11712/new-media/twitter-and-digg-to-introduce-social-media-touselection-coverage>.
- Lafarsfeld, P., F., Berelson, B. and Gaudet, H. (1948). *The Peoples Choice*. New York: Columbia University Press.
- Larsson, O., A. & Moe, H. (2011). "Studying political microblogging: Twitter users in the 2010 Swedish election campaign", in *New Media & Society*, 14(5) 729– 747.
- Lassen, D. & Brown, A. (2011). "Twitter: The electoral connection?" *Social Science Computer Review*, 29 (4) 419–436.
- Lazăr, Marina-Irina. (2015). Reinforcing Democracy through Internet and Social Networks Participation: Votes, Voters and Elected Behavioral Outcomes in Romanian Presidential Elections. *RSP* 46, 63-72.

- Liddle, R., W. (1971). *Ethnicity, Party and National Integration: An Indonesian Case Study*. New Heaven and London: Yale University Press.
- Litbang Kompas, (2018). 'Memetakan Minat pemilih pemula', diakses online dari <http://www.Indonesiamemilih.com>.
- Marijan, K. (2011). *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*. Jakarta: Kencana.
- Moreno, Andres., Garrison, Philip and Bhat, Karthik. (2016). WhatsApp for Monitoring and Response during Critical Events: Aggie in the Ghana 2016 Election, in Tina Comes, Frederick Benaben, Chihab Hanachi, Matthieu Lauras, and Aurelie Montarnal (eds), *WiPe Paper–Social Media Studies: Proceedings of the 14th ISCRAM Conference*, Albi, France, May.
- Moura, M. & Michelsen, M. (2017). WhatsApp in Brazil: mobilising voters through door-to-door and personal messages. *Internet policy review* 6(4). DOI: 10.14763/2017.4.775,
- McConnell, Patrick J. and Lee, Becker B. (2002). 'The Role of the Media in Democratization', paper presented to the *Political Communication Section of the International Association for Media and Communication Research*, Barcelona Conference, July.
- Nordholt, Henk Schulte, Van Klinken, Gerry dan Karang Hooggenboom, Ireen. (2007). *Politik lokal di Indonesia*. 2007. Jakarta: KITLV-Jakarta dan Obor Indonesia.
- Neuhaus, F. & Webmoor, T. (2012). "Agile ethics for massified research and visualization", *Information, Communication & Society*, 15(1), 43-65.
- Ovadia, S. (2009). "Exploring the potential of Twitter as a research tool" *Behavioral & Social Sciences Librarian*, 28(4), 202-205.
- Pamungkas, S. (2010). *Pemilu, Perilaku Pemilih & Kepartaian*. Yogyakarta: Institute for Democracy and Welfarism.
- Perret, Daniel. (2010). *Kolonialisme dan Etnisitas: Batak dan Melayu di Sumatera Timurlaut*. 2010. Jakarta: Kepustakaan Popular Gramedia dan EFEQ-Jakarta.
- Prokhorov, Sergiy. (2012). *Social Media and Democracy: Facebook as a Tool for the Establishment of Democracy in Egypt*. Master Thesis. Malmo University, School of Arts and Communication.
- Rachmat, B. dan Esther. (2016). *Perilaku Pemilih Pemula pada Pilkada Serentak di kecamatan Ciomas kabupaten Serang, tahun 2015*. Jurnal Ilmu Pemerintahan Widyapraja, vol. XLII, no. 2, pp. 25-35.

- Ritzer, G. & Goodman, D.,J. (2007). *Teori Sosiologi Modern*. Edisi ke-6. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Roth, D. (2009). *Studi Pemilu Empiris*. Jakarta: Friedrich-Naumann Stiftung fur die Freiheit.
- Surbakti, R. (2010). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widayasarana Indonesia.
- Suhartono, (2009). *Tingkat kesadaran Politik Pemilih Pemula dalam Pilkada: Suatu Refleksi School-Based democracy Education: Studi Kasus Pilkada Provinsi Banten Jawa Barat*. Hasil Penelitian, Pascasarjana UPI, 2009. pp. 6
- Schiffrin, Anya. (2017). *In the Service of Power: Media Capture and the Threat to Democracy*. Washinton: Center for International Media Assistance, National Endowment for Democracy, Columbia School of International and Public Affairs.
- Small, T. (2011). "What the hashtag?: A content analysis of Canadian politics of Twitter" *Information, Communication & Society* 14, 872-95.
- Vergeer, M., L. Hermans, L. & Sams, S. (2011). "Online social networks and micro-blogging in political campaigning: The exploration of a new campaign tool and a new campaignstyle", *Party Politics*, 477-501.
- Von Orgies-Rutenberg, Niklas. (2016). *Media & Democracy in the Digital Age: Lincoln Dahlberg and the main issues in contemporary debate*. Arcada.

Eronid L. Damanik, adalah pengajar tetap di Departemen Pendidikan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Menamatkan studi doktor (S3) tahun 2016 dari Universitas Airlangga Surabaya, magister (2005) dan Sarjana (2000) dari Universitas Negeri Medan. Mengikuti konferensi internasional EurAASEA di Berlin (2009), konferensi internasional SSEASR di Bhutan (2011), Philipina (2013), Srilangka (2015), dan Vietnam (2017). Hingga saat ini telah menulis 25 buku dan puluhan artikel serta jurnal.